

SKRIPSI  
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
TERHADAP BARANG YANG TIDAK DITEMUKAN PADA  
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan  
Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum*



Oleh :

Sherly Cecelia  
201000474201015

JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
TAHUN 2023

*No.Registrasi : 522/FHUK-UMMY/IV-2024*

## ABSTRAK

### **PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP BARANG YANG TIDAK DITEMUKAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**

Sherly Cecelia, **201000474201015**, Fakultas Hukum Universitas  
Mahaputra Muhammad Yamin, Dr.Aermadepa, SH.MH,  
Dr. Yulia Nizwana, S.H,M.H

Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Sekretariat Daerah Kota Solok yang merupakan fenomena yang belum ada regulasinya dalam aturan Daerah Kota Solok. Barang yang tidak ditemukan tersebut berkaitan dengan penatausahaan yang dilakukan oleh pengurus barang Sekretariat Daerah Kota Solok. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok dan apa kendala penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis sosilogis, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh. Selain menggunakan penelitian lapangan, peneliti juga melakukan penelitian yang didukung oleh kajian pustaka. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah Terhadap Barang Yang Tidak Ditemukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016.

Hambatannya Peraturan Daerah belum ada mengenai barang milik daerah yang tidak ditemukan tersebut. Kendala utama yang menjadi penghambat adalah ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan sebagai barang yang tidak ditemukan, kurangnya sumber daya manusia dalam memahami teknis penghapusan. Maka kegiatan manajemen aset pada Sekretariat Daerah Kota Solok yang pengelolaannya dibawah Bagian Umum memiliki banyak permasalahan dalam penatausahaan Aset itu sendiri ini disebabkan karena pengelolaan Aset bukan pada Sekretariat Daerah saja tapi pada Rumah Dinas dan Jabatan yang diluar jangkauan pengelola aset dalam hal ini selaku Pengurus Barang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta : CV Jakad Media Publishing. 2022.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu. 2020
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita 2005.
- Majid Jamaludin, *Akutansi Sektor Publik, Gowa*: CV Berkah Utami, 2019
- Muh.Yani Balaka, dkk, *Metode Penelitian Kuantitati*,. Bandung : Widina Bakti. 2022
- M. Aries Djaenuri, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah* : Jakarta : Modul. 2023
- Nama I Ketut, dkk. *Pengelolaan Aset Daerah*, Yogyakarta : LPM. 2020
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985,
- Sadu Wasistiono, M.S, *Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah*, Bandung, 2009
- Seksi Inventarisasi, Pelaporan, dan Perencanaan Bidang Aset. *Buku Saku Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta : DPPKA. 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta : Bina Aksara, 1989
- Sri Wahyuni. *Pengantar Manajemen Aset*. Makasar : Nas Media Pustaka, 2020
- Tim UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Barat. *Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah*. Kalimantan Barat: JDIH. 2020
- Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintrah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

## **C. Jurnal**

Putu Wawan Martina, Titi Herwanti, & Hermanto, Jurnal *Implentasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Daerah*. Jurnal

